

Partisipasi Masyarakat Kecamatan Danau Kerinci Dalam Pemilihan Gubernur Pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci

Ade Candra Gustia

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

adecandragustia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengungkap penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat Kecamatan Danau Kerinci pada Gubernur Pilkada Kabupaten Kerinci. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan diperkaya dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini disebabkan oleh faktor lapangan kerja masyarakat yang didominasi pekerjaan sebagai petani yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya pada saat pemilihan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada calon. Selain itu, minimnya diskusi politik di masyarakat baik formal maupun informal, serta pengaruh masyarakat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sehingga tidak ikut serta dalam Pemilu Serentak. Bahkan secara administratif masih terdapat kelemahan pendataan atau ketepatan dalam pemberian hak pilih dan kurangnya sosialisasi yang masih menjadi keluhan masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Gubernur, Masyarakat

Abstract

This research reveals the causes of low political participation of the Danau Kerinci District Society in the Governor Election in Kerinci Regency. Design that used in this research is qualitative and enriched with quantitative data. The Results of the research is caused by the employment factor of the society which is dominated work as farmers that cannot leave the job at the election time and the mistrust of the society to the candidate. In addition, the lack of political discussions in the society both formal and informal, and also the influence of community causes public worries using their suffrage so they are not participating the Concurrent Election. Even administratively, there are weaknesses regarding the data collection or the accuracy in the granting of suffrage and lack of socialization which is still being a complaint for the society.

Keywords: Political Participation, Governor Election, Society

Pendahuluan

Pendahuluan Pemilihan umum telah menjadi sebuah sarana demokrasi di Indonesia, hal tersebut telah mengalami suatu perubahan sejak zaman reformasi dengan tujuan untuk mewujudkan sistem politik demokratis dalam menggunakan pemilihan secara langsung dengan melibatkan seluruh warga negara untuk ikut serta dalam proses pemberian suara (votting). Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri bahwa setiap pengambilan kebijakan mengacu pada aspirasi masyarakat. Peran penting masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat terhadap politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan eksekutif di pemerintah pusat maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Demokrasi sesungguhnya yaitu menjalankan sebuah kedaulatan wakil-wakil rakyat sebagaimana telah ditentukan sendiri oleh rakyat yang berwenang dalam mewakili rakyat. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Partisipasi politik mampu mempengaruhi masyarakat apabila proses politik berjalan secara stabil. Masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi, dapat dikatakan memiliki kemauan dalam pembangunan bangsa dan juga sebagai bentuk dari upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengaktualisasikan cita-citanya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa, “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Penjelasan menekankan bahwa kepala daerah yang terpilih ditentukan oleh pilihan rakyat yang berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat secara bebas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Diselenggarakannya Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi bagi seluruh rakyat disebagian daerah, termasuk di daerah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, untuk ikut serta melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tentunya diharapkan mampu memberikan aspirasi dalam menentukan pilihan sesuai hati nurainya, serta mampu mempertanggung jawabkan atas pilihannya ataupun bersikap sportif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Hamid (2015), mengungkapkan bahwa “fenomena yang terjadi pada perhelatan pilkada serentak tahun 2015 di Jambi lebih memandang figur bukan partai”. Meskipun pasangan incumbent yang notabeneanya membawa partai besar, seperti Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun tak mempengaruhi perolehan suara meskipun pada pileg sebelumnya. Partai PDIP dan Demokrat termasuk dalam perhitungan partai besar penguasa di Jambi, namun bukan menjadi jaminan bakal besar di Pemilihan Gubernur.

Berdasarkan data jumlah pemilih terdaftar dan penggunaan hak pilih pada pemilihan gubernur di Kabupaten Kerinci, menunjukkan bahwa di Kecamatan Danau Kerinci memiliki partisipasi yang paling rendah diantara kecamatan lain yaitu sebanyak 17.208 daftar pemilih tetap dan sebanyak 5.724 (33,26%) pengguna hak pilih sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 11.848 (66,73%). Dilihat dari segi sosial masyarakat bahwa di daerah Kecamatan Danau Kerinci yang rata-rata mayoritas pekerjaannya adalah petani, nelayan, dan pegawai negeri sipil serta memiliki tingkat perekonomian yang menengah ke bawah.

Dampak positif dari partisipasi politik yaitu masyarakat yang semakin berwawasan dan kritis, adanya peningkatan partisipasi politik dari masyarakat, serta terpeliharanya stabilitas politik negara untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang ekonomi yang sangat berpengaruh dari stabilitas politik dalam negeri. Sedangkan pada sisi negatifnya yakni menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunnya tingkat keikutsertaan dalam pemilihan umum, kurangnya aspirasi dan partisipasi rakyat secara menyeluruh dari lapisan menengah ke bawah. Salah satu dampaknya ialah kecenderungan semakin melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, terutama masyarakat kecil yang selalu terpuruk dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Hal ini terlihat saat pemerintah yang menaikkan beban ekonomi pada masyarakat secara umum mengakibatkan sebuah problema yang mempengaruhi tata kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Kantaprawira (Arraniri, 2015:6), bahwa “melek politik menjadi perwujudan dan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya”. Pengetahuan politik pada masyarakat agar selalu diberikan secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat dapat lebih baik ataupun meningkat. Mengacu pada hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Partisipasi Masyarakat Kecamatan Danau Kerinci dalam Pemilihan Gubernur pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci”.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, namun diperkuat dengan pendekatan kuantitatif agar dapat diperoleh temuan yang komperhensif. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran angket yang berjumlah 95 sampel, selain itu data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari, Camat Danau Kerinci, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Sub. Bagian Keuangan dan Logistik, Kepala-kepala Desa di Kecamatan Danau Kerinci, Ketua PPS, dan Masyarakat. Teknik yang digunakan yaitu teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dengan Bapak Pirmansyah, S.E selaku Camat Danau Kerinci, mengatakan bahwa, sosialisasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi dalam Pilgub pada Pilkada Serentak diwilayah Kecamatan Danau Kerinci. Partisipasi masyarakat Kecamatan Danau Kerinci saat ini yang terlihat jauh menurun, akan tetapi terkadang masyarakat belum tentu dengan sengaja tidak menggunakan hak pilih ataupun golput, namun bisa saja masyarakat tidak semuanya mengerti akan pentingnya partisipasi politik dalam menggunakan hak suaranya. Selain itu, masyarakat yang mayoritas petani dan para pekerja yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat menggunakan hak pilihnya. Mensosialisasikan Pilgub tersebut seharusnya perlu ditingkatkan, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang sama sekali tidak terlibat dalam menggunakan hak pilih, kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya tugas dari pihak KPU saja, sebaiknya kegiatan sosialisasi tersebut saling ada kerja sama antar pihak Kecamatan, perangkat

desa, dan KPU dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat, agar pengetahuan masyarakat tentang politik semakin membaik.

Wawancara dengan Bapak Afdhal, S. PdI sebagai ketua KPU Kabupaten Kerinci memaparkan bahwa, mengenai sosialisasi memang menjadi salah satu pengaruh masyarakat dalam memberikan hak suaranya, akan tetapi dari pihak KPU memang memiliki program dalam mensosialisasikan pilgub pada pilkada serentak. Tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat tergantung dari penyelenggarannya. Dilihat secara umum pada Pilpres, Pilgub, Pilbup, dan bahkan Pileg mempunyai tingkat partisipasi yang berbeda, hal itu disebabkan tidak adanya suatu perangsang politik yang mempengaruhi masyarakat. Terlihat dari kesiapan pihak KPU telah memberikan seluruh kemampuan dalam hal sosialisasi, tetapi KPU juga memiliki suatu keterbatasan waktu dan masalah anggaran, sehingga sosialisasi tidak dilakukan secara merata keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci ataupun desa-desa termasuk wilayah Kecamatan Danau Kerinci, ditambah lagi disebabkan oleh keterbatasan dari tim dalam melaksanakan sosialisasi. Akan tetapi untuk kedepan demi tercapainya sosialisasi yang sesuai dengan tujuan dengan dilakukannya kerja sama, baik dari pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah-sekolah agar mampu mendorong para pemilih pemula untuk terlibat dalam pemilihan. Ditambah lagi bekerja sama dengan pihak kampus, aktifis-aktifis, dan organisasi-organisasi agar memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat supaya melibatkan diri dalam partisipasi politik, khususnya berpartisipasi dalam pemberian suara.

Wawancara dengan Bapak Harkani, S. Sos sebagai Kepala Desa Sanggarang Agung, mengatakan bahwa, penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, disebabkan oleh masyarakat yang tidak terlalu antusias dalam menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut, mereka merasakan adanya kejenuhan dalam pesta demokrasi yang dilakukan berturut-turut, sebelum adanya pilgub pada pilkada serentak juga dilakukan pileg. Perbedaan yang muncul antara pileg dan pilgub sangatlah berbeda pada masyarakat Kecamatan Danau Kerinci, masyarakat lebih memandang bahwa pileg lebih berpengaruh dibanding pilgub, sebab calonnya terlibat langsung melihat kondisi masyarakat. Masyarakat tentu sudah mengetahui dengan calon-calon yang akan dipilihnya, ditambah lagi di Kabupaten Kerinci, tingkat pilihnya lebih banyak berasal dari keluarga-keluarga besar dari para calon. Perbedaan pada pilgub ialah keterlibatan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan, sebab hanya orang-orang yang merasa berkepentingan di dalam masyarakat terlibat dalam pemilihan gubernur dan ditambah lagi kebanyakan dari masyarakat petani yang beranggapan bahwa suara mereka tidak mempengaruhi hasil dari pilgub itu sendiri.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik

a. Tuntutan Pekerjaan

Menurut Frank Lindefeld (Maran, 2007:156), menjelaskan bahwa, status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik. Hal tersebut didasarkan oleh kondisi masyarakat dengan tingkat menengah ke bawah dengan kondisi masyarakat yang dengan tingkat menengah ke atas yang, sehingga bagi masyarakat menengah ke bawah beranggapan ikut terlibat dan tidak terlibat dalam partisipasi politik belum tentu mempengaruhi tingkatan perekonomian masyarakat.

Hal yang menyebabkan individu ataupun sekelompok masyarakat dalam keterlibatannya pada partisipasi politik dikarenakan, tercapainya suatu dukungan dari status sosial dan ekonomi

dalam masyarakat. Selain itu adanya situasi, kondisi, dan pengalaman dalam berorganisasi yang memungkinkan individu ataupun masyarakat untuk melakukan aktifitas politik. Serta adanya perhatian dan kepedulian terhadap negara ataupun pemerintah.

b. Ketidakpercayaan pada Calon

Menurut Burhanuddin Muhtadi (Setiawaty, 2014:122), peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) semakin rendahnya angka partisipasi politik disebabkan karena partai politik tidak memiliki program dan platform yang jelas antara partai yang satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya mereka hanya berburu rente dan mendekati pemilih menjelang pemilu. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan pemilih mudah berontak, tidak setia, dan kemudian mengakibatkan fluktuabilitas dukungan kepada partai-partai. Menurut Firmanzah (Arwiyah, 2012:14), mengatakan bahwa partisipasi politik meningkat apabila didukung oleh kepercayaan warga negara terhadap partai politik sebagai media penghubung antara kepentingan mereka dengan pemerintah, sebaliknya rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat menutup sistem dan budaya demokrasi. Bagi sebageian masyarakat yang berpandangan negatif terhadap calon disebabkan oleh adanya kekecewaan masyarakat terhadap calon. Menurut Maran (2007:155), sikap masyarakat tersebut ialah sinisme politik terhadap calon, sebab sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Bagi orang-orang sinis beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tak tahu malu.

Menurut Yuliono (2013:175), rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, baik eksekutif, birokrasi, lembaga peradilan, lembaga perwakilan maupun partai politik adalah sebuah hambatan besar bagi perkembangan demokrasi. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada, menjadikan kondisi yang membahayakan bagi masa depan demokratisasi. Sebuah rezim demokrasi terkonsolidasi hanya jika mayoritas publik saja, meskipun dalam keadaan sulit atau krisis, tetap pada keyakinan bahwa prosedur dan lembaga demokratis merupakan jalan yang paling tepat untuk mengatur kehidupan bersama serta dukungan publik terhadap alternatif-alternatif non demokratis sangat kecil.

Golongan non participation di dalam masyarakat muncul, dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa merasa tidak perlu mengikuti pemilihan suara, walaupun mempunyai pengetahuan tentang politik. Sebab bagi masyarakat tersebut sudah tidak memiliki suatu kepercayaan serta kecewa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik dan ditambah lagi tidak mempunyai kekuatan penuh untuk memperbaiki ataupun terus mengikuti alur suatu kebijakan pemerintah.

c. Diskusi Politik

Lingkungan menjadikan faktor sarana diskusi masyarakat. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam diskusi informal, menjadikan masyarakat dapat memahami dengan baik tentang politik, bahkan bisa juga bersikap anomi terhadap pemerintah. Menurut Hendrik (2010:142), mengatakan faktor penyebab individu terlibat ataupun tidak terlibat dalam partisipasi politik, disebabkan oleh diskusi-diskusi politik. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat berawal dari diskusi politik dan bagaimana respon ataupun reaksi masyarakat setelah memahami

diskusi politik, sebab diskusi politik mampu mengarahkan ke hal positif dan negatif dan kurangnya diskusi politik menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik.

d. Kelompok yang ada di dalam Masyarakat

Keadaan politik ataupun lingkungan politik dan bahkan kelompok yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi politik, karena hal tersebut akan mampu memicu tinggi ataupun rendahnya angka partisipasi politik pada masyarakat, terutama mengenai partisipasi dalam pemberian suara. Sebab dengan pemahaman politik yang minim, masyarakat mampu memandang seorang calon ketika memandang figur yang dipilih berdasarkan kriterianya. Sedangkan menurut Milbrath (KPU Pasuruan, 2015:14), menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu:

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik, karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi karena sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
3. Karakteristik sosial seseorang, karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok, ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
4. Keadaan politik Lingkungan, politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik, dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Dorongan partisipasi masyarakat yang sebenarnya tidak terlepas dari faktor karakter pribadi dan karakter sosial individu itu sendiri serta secara tidak langsung mampu membentuk karakter disetiap individu. Sebab, hal tersebutlah yang mampu menggiring masyarakat mempermudah dalam memahami politik sebenarnya.

Tanggapan Masyarakat terhadap Partisipasi Politik

a. Partisipasi Politik

Menurut Hasrul (Nurcholish Madjid, 2016:21), bahwa masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan dan pemilihan.

Partisipasi dari masyarakat yang diharapkan akan terus meningkat, namun pada kenyataannya bahwa partisipasi masyarakat semakin menurun disebabkan kurangnya kepercayaan pada calon pemimpin. Hal yang sama dikatakan oleh Morris Rotenberg (Hoogerwef, 1985:190), bahwa semakin sedikit partisipasi politik berarti semakin buruk keadaan demokrasi, sikap apatis dianggap sebagai tanda timbulnya rasa kurang percaya terhadap efektifitas partisipasi politik yang diberikan.

b. Administratif

Pendapat yang diberikan oleh David Moon (Eef, 2012), golput teknis-politis, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih karena kesalahan dirinya atau disebabkan oleh pihak lain. Adapun keluhan dari masyarakat tentang Pilkada Serentak berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi secara individu, sebab salah satu faktornya berada pada pendataan masyarakat, sehingga menyebabkan salah satu permasalahan yang sering muncul di setiap pemilihan berlangsung.

c. Sosialisasi

Menurut Soebagio (2008:84), suatu kenyataan terjadinya golput ialah kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping itu kurangnya sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas. Permasalahan sosialisasi menjadi sebuah hal baru bagi sebagian kalangan masyarakat terutama pada masyarakat yang tingkat pemahaman mengenai politik masih rendah.

Kebutuhan akan sosialisasi ataupun informasi bagi masyarakat tentunya akan membawa suatu dampak yang baik terhadap partisipasi politik. Sosialisasi yang terencana, terprogram, dan didukung oleh dana yang cukup serta persiapan yang matang sehingga mampu melibatkan seluruh elemen-elemen yang ada tentunya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang luas terhadap partisipasi politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Kumpulan masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil merupakan golongan penduduk yang kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik.

Partisipasi politik yang tinggi disuatu negara demokrasi pada umumnya dianggap baik karena mampu ditunjukkan oleh semua warga negara aktif dalam mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Pencapaian dari partisipasi politik mampu menunjukkan rezim pemerintahan yang berjalan memiliki legitimasi yang tinggi. Menurut Miriam Budiardjo (Setawaty, 2014:120), bahwa bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur intensitasnya adalah persentase orang yang menggunakan hak pilih pada saat pemilu (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Menurut Herbert Mc Closky

(Damsar, 2010:180), bahwa “Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Selanjutnya menurut Micheal Rush dan Philip Althoff (Damsar, 2010:180), “partisipasi politik sebagai keterlibatan dan aktivitas politik pada suatu sistem politik”, secara umum menurut para ahli dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan aktivitas sukarela yang terjadi pada masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi suatu kebijakan.

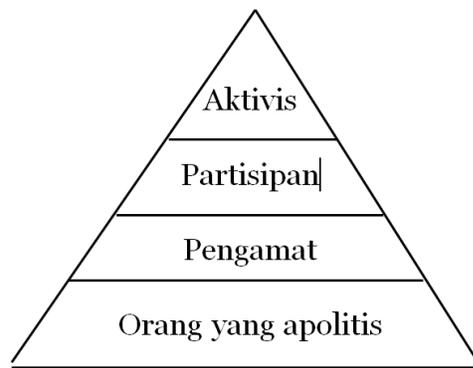
Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Adams (Miaz, 2012:20), “partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan masyarakat”. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan orang yang berkuasa.

Menurut Miriam Budiardjo (Miaz, 2012:21), “partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah dari masyarakat”. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurangnya diperhatikan. Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat yang turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, semakin banyak partisipasi politik dari masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi tentunya semakin lebih baik.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik serta turut serta atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara memberi tanda yang kurang baik. Indikasi yang dapat disebutkan bahwa masyarakat kurang atau bahkan sama sekali tidak berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan, bahwa partisipasi politik merupakan intensitas aktif dari kegiatan seseorang, sekelompok orang, bahkan seluruh warga negara untuk ikut serta dalam kegiatan politik, seperti: memberi dukungan, memilih calon pemimpin negara, walikota, gubernur, bupati, dan keterlibatan dalam diskusi politik secara formal serta informal. Secara umum dalam kegiatan partisipasi tersebut mempunyai tujuan, yaitu mempengaruhi suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah kota maupun daerah.

Menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson (Damsar, 2010:183), memberi gambaran tentang, “tipologi politik atas dasar piramida politik”, pandangan Roth dan Wilson tentang piramida politik menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang terlibat di dalamnya.



Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik (Sumber: Roth dan Wilson dalam Damsar, 2010:184)

Keterangan dari penjelasan dari piramida partisipasi politik, sebagai berikut:

1. Kelompok aktivis adalah pemimpin dan para fungsionaris partai atau kelompok kepentingan, serta anggota partai atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (full time).
2. Kelompok partisipan mencakup berbagai aktivitas seperti petugas atau juru kampanye, mereka terlibat dalam program atau proyek sosial, sebagai pelobi politik, aktif dalam partai politik atau kelompok kepentingan.
3. Kelompok pengamat adalah mereka yang menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, diskusi politik, dan hadir dalam kampanye politik.
4. Kelompok orang yang apolitis yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik, mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

SIMPULAN

Rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Danau Kerinci saat Pemilihan Gubernur pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Tahun 2015, disebabkan oleh faktor pekerjaan dari masyarakat yang mayoritas petani tidak bisa meninggalkan pekerjaan pada saat pemilihan dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pasangan calon gubernur. Selain itu, kurangnya diskusi politik yang dilakukan oleh masyarakat baik secara formal maupun informal, serta adanya pengaruh kelompok yang menyebabkan terjadinya kerisihan masyarakat dalam menggunakan hak pilih, sehingga tidak ikut serta dalam Pilkada Serentak. Terkait dengan rendahnya partisipasi politik, tanggapan masyarakat Kecamatan Danau Kerinci terhadap partisipasi politik saat Pemilihan Gubernur pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kerinci Tahun 2015, bahwa permasalahan partisipasi politik pada masyarakat saat Pilkada serentak, dikarenakan oleh perbedaan antusias masyarakat pada saat Pileg dan Pilkada dilakukan secara berturut-turut yang menyebabkan suatu kejenuhan dari masyarakat. Bahkan secara administratif terdapat kelemahan-kelemahan mengenai masalah pendataan ataupun ketepatan dalam pemberian hak pilih dan permasalahan sosialisasi yang masih menjadi suatu keluhan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arraniri, Iqbal. 2015. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Melalui Kemampuan Melek Politik (Political Literacy) dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sukabumi. Tersedia di http://www.kpu.go.id/koleksigambar/Upaya_Meningkatkan_Partisipasi_Politik_Melalui_Kemampuan_Melek_Politik_Sukabumi.Pdf.
- Arwiyah, M Yahya. 2012. Peranan Status Ekonomi Pemilih dan Kualitas Partai Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Daerah. Tersedia di http://repository.upi.edu/7967/1/d_pkn_0907509_chapter1.pdf.
- Hasrul. 2016. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. Tersedia di <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/download/10/11>.
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. Tersedia di <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=101259&val=1511>.
- Maran, Rafael R. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawaty, Diah. 2014. Mendorong Partisipasi Pemilih Muda melalui Pendidikan Politik yang Prognatik. Tersedia di <http://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jie/article/download/30/pdf>.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Yuliono, Anton. 2013. Kepercayaan Masyarakat pada Partai Politik (Studi Kasus Kecenderungan Golongan Putih pada Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Surabaya). Tersedia di <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dia/article/download/298/185>.